

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN
DENGAN PENGGUNAAN BAHAN PANGAN LOKAL**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Progam Studi Ilmu
Pemerintahan



Oleh :

SUSWENI LIA MULIANA

NIM : 2122013

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

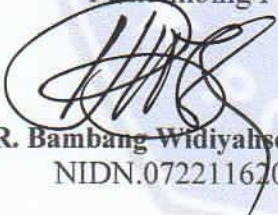
HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini disusun oleh : SUSWENI LIA MULIANA
NIM : 21222019
Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN MAGETAN DALAM
PENGUNAAN BAHAN PANGAN LOKAL
Disahkan Pada : 10 Maret 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Ponorogo, 10 Maret 2023

Pembimbing I


DR. Bambang Widiyanseno, M.si
NIDN.0722116201

Pembimbing II


Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si
NIDN. 0708118802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN MAGETAN DALAM
PENGUNAAN BAHAN PANGAN LOKAL

Disusun oleh : SUSWENI LIA MULIANA

NIM : 21222019

Telah dipertahankan di :
depan penguji pada 25 Januari 2023

Hari : Jum'at

Ruang : Ruang Sidang B 103

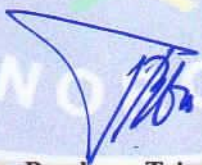
Pukul : 12.30 – 14.00 WIB.

Penguji I



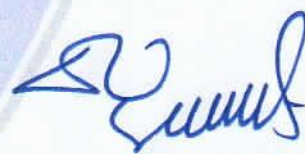
Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si
NIDN.0722116201

Penguji II



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Penguji III



Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si
NIDN. 0708118802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph. D
NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSWENI LIA MULIANA

NIM : 21222019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 25 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



SUSWENI LIA MULIANA
NIM. 2122019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id, Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/NAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIK : 1986022820150913
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekeyaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Susweni Lia Muliana
NIM : 21222019
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Dengan Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Progam Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIK. 1986022820150913

Pembimbing

Dr. Bambang Widlyanseno, M.Si
NIDN. 0722116201

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Hanya kepada Allah SWT penulis mampu berdaya upaya dalam segala hal, tiada hal yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Junjungan Kita Nabi Muhamad SAW yang telah memberi suri tauladan kepada seluruh ummat manusia yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya dihari akhir.

Dalam rangka proses penyusunan HKI ini, bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr.Banbang Widiyahseno,M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Keluarga dan kerabat dekat atas semua do'anya dan yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempurnaan hanya milik Allah serta kekurangan datang dari kita termasuk di dalam penulisan HKI ini dimana penulis menyadari adanya kekurangan dan meminta maklum dari paa pembaca untuk sudi kiranya memberikan kritik dan saran ke depannya .

Teriring harapan dan doa kepada Allah Swt agar senantiasa memberikan keberkahan terhadap segala pihak yang telah penulis sebutkan di atas , dan semoga HKI ini bermanfaat bagi kita semua.

Ponorogo, 10 Maret 2023

SUSWENI LIA MULIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum	3
B. Lokasi.....	5
C. Kelebihan	5
D. Nilai Jual	5
E. Cara Pemanfaatan.....	5
BAB II HASIL DAN BAGAN	
A. Rencana dan Validasi HKI.....	6
B. Hasil HKI	6
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	7
B. Kritik dan Saran	7
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar dan Bagan Alur HKI	4
---------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Adanya Krisis pangan global akibat terganggunya pasokan gandum yang disebabkan perang dunia anatar Rusia dan Ukraina serta adanya larangan ekspor gandum dari Hindia merupakan salah satu sebab naiknya harga gandum dan tepung terigu. Indonesia yang dalam hal ini sebagai Negara pengimport tepung terigu sebagai bahan dasar pembuat kue, mie macaroni biscuit dan hasil pengeolahan pengawetan daging dan makanan lainnya menyebabkan tidak terpenuhinya akan kebutuhan itu, karena harga yang semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi maka akan menimbulkan inflasi .
- Masalah pangan merupakan salah satu masalah dasar. Apabila masalah pangan tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan efek domino seperti ketidakstabilan politik, keamanan dan lain lain . Dalam Upaya untuk menangani masalah tersebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat Mendagri Tanggal 14 Mei 2020 dan 8 Agustus 2020 terkait pembentukan satuan tugas pangan pemerintah daerah yang diketua oleh Sekretaris Daerah Di Kabupaten Magetan sudah dibentuk Satuan tugas pangan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/ 159/ Kept/ 403.013/ 2020. Apabila terjadi kaitan masalah pangan di daerah seperti kenaikan harga yang signifikan ataupun keterbatasan stok , sekda dan satgas pangan Pemerintah Daerah harus mengambil langkah langkah paralel dengan satgas pangan yang dibentuk dengan kepolisian ,
- Terkait hal di atas pula pemerintah daerah mengambil langkah dengan mengambil kebijakan dengan dikeluarkannya surat edaran Sekretaris Daerah Nomor : 500/ 467/403.022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang himbauan penggunaan bahan pangan local dalam pelaksanaan belanja makanan dan minuman rapat atau secara kedinasan lainnya pada semua perangkat daerah di Kabupaten Magetan .

B. Tujuan

- Adapun tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut sebagai upaya mendukung program pemerintah pusat yaitu penganjangan program B2SA yang meliputi beragam bergisi seimbang dan aman .Upaya yang dimaksud ditujukan untuk pengembangan diversifikasi pangan local berbasis kearifan local dan sebagai upaya mengurangi dampak krisis komoditas pangan akibat kenaikan harga pangan yang berasal dari bahan import terutama tepung terigu.

C. Manfaat

- Adapun tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut sebagai upaya mendukung program pemerintah pusat yaitu penganjangan program B2SA yang meliputi beragam bergisi seimbang dan aman .Upaya yang dimaksud ditujukan untuk pengembangan diversifikasi pangan local berbasis kearifan local dan sebagai upaya mengurangi dampak krisis komoditas pangan akibat kenaikan harga pangan yang berasal dari bahan import terutama tepung terigu.

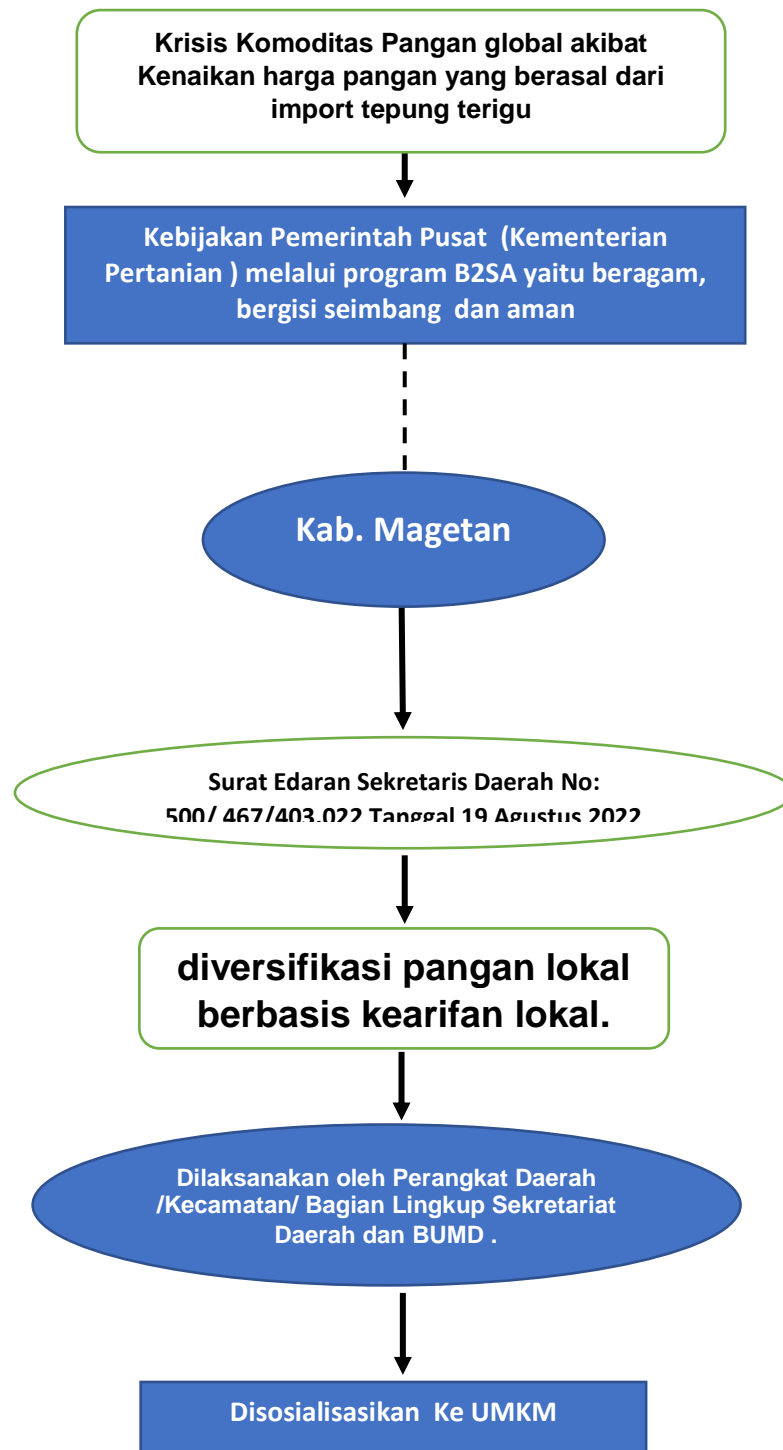
BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

- Penggunaan pangan lokal sangat penting untuk ketahanan pangan dan pola konsumsi , terutama saat menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan , akses pangan dan keterjangkauan harga .Terkait hal tersebut diatas maka pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan dikeluarkannya surat edaran Sekretaris Daerah Nomor : 500/ 467/403.022 Tanggal 19 Agustus 2022 terkait himbauan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan belanja makan minum untuk keperluan rapat atau secara kedinasan lainnya pada Perangkat Daerah /Kecamatan/ Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan BUMD .Surat edaran tersebut juga sebagai upaya mendukung program B2SA yaitu beragam, bergisi seimbang dan aman . Adapun Upaya yang dimaksud yaitu melalui pengembangan diversifikasi
- Adapun program yang dicanangkan Pemerintah daerah tersebut sebagai upaya mengurangi dampak krisis komoditas pangan akibat kenaikan harga pangan yang berasal dari bahan import terutama tepung terigu, selain itu hal ini bertujuan untuk mendorong Pelaku Usaha UMKM di daerah agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi olahan pangan lokal serta dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan produk pangan lokal menjadi produk yang dapat menguatkan bisnis UMKM khususnya UMKM olahan pangan lokal menjadi bisnis strategis dalam menghadapi berbagai produk pangan yang banyak beredar di pasaran saat ini.

Gambar dan Bagan Alur HKI



B. Lokasi

Kabupaten Magetan

C. Kelebihan

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami , namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting.
2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbaharui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya.

D. Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir. Walaupun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan, namun penulis membebaskan siapapun untuk meng-copy, ,enggandakan, menyebarkan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materil.

E. Cara Pemanfaatan

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai ruang dan tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanoa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki satu sampai dua lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.
4. Perlu bimbingan orang tua agar dapat dipahami oleh anak – anak usia remaja.

BAB III

RENCANA DAN HASIL

A. Rencana dan Validasi HKI

Pada tahap Rencana ini , penulis berusaha menemukan ide dan mencari permasalahan di Kabupaten Magetan untuk dilakukan penelitian dalam bentuk pembuatan poster. Penulis melakukan Koordinasi dengan dosen.pembimbing untuk mendapat arahan secara teknis maupun tertulis , untuk menyelaraskan proses penelitian dengan maksud dan tujuan penulis.

Tahap akhir adalah melakukan validasi dengan cara mengikuti ujian persidangan bersama dengan poster cetak dan narasi poster tertulis. Dalam tahap ini penulis memaparkan permasalahan, hasil, alasan, serta solusi sesuai dengan judul poster sebagai bentuk pertanggungjawaban dan uji kebenaran data.

B. Hasil HKI

Adanya Kebijakan pemerintah Daerah yang ditetapkan mendorong Dinas/ Instansi di Kabupaten Magetan untuk mensosialisasikan kepada pelaku UMKM agar senantiasa menggunakan bahan non tepung terigu Sebagai bahan dasar pembuat snack atau kue. Hal ITU Juga berdampak pada pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar lebih bersaing di pasaran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Program kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Magetan dengan penggunaan bahan pangan local sebagai upaya mengurangi dampak krisis komoditas pangan akibat kenaikan harga pangan yang berasal dari bahan import terutama tepung terigu selain itu hal ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha UMKM di Daerah agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi olahan pangan local serta dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan produk pangan local menjadi produk yang dapat menguatkan bisnis UMKM khususnya UMKM olahan pangan local menjadi bisnis strategis dalam menghadapi berbagai produk pangan yang banyak beredar di pasaran.

B. Kritik dan Saran

- Pemerintah Daerah hendaknya senantiasa melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil agar senantiasa dapat mengontrol ketersediaan bahan pangan local dan hendaknya rutin memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap UMKM agar produknya mampu bersaing di pasaran.

LAMPIRAN

**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RAKOR PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI
TANGGAL 07 NOVEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 14 NOVEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 21 NOVEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 28 NOVEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 05 DESEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 12 DESEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 19 DESEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 26 DESEMBER 2022**



**ZOOM RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DEARAH (TPID)
BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TANGGAL 31 OKTOBER 2022**



**RAPAT KOORDINASI HIGH LEVEL MEETING (HLM)
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
27 DESEMBER TAHUN 2022**



